

## **ABSTRAK**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Aceh Barat  
Jenis Peraturan : Peraturan Bupati  
Nomor : 3  
Tahun : 2024  
Diundangkan : 4 Januari 2025  
Jumlah Halaman : 9 Halaman  
Tentang : Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023–2027

## **ABSTRAK**

Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan langkah strategis untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan dasar di daerah tersebut. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa masyarakat Kabupaten Aceh Barat dapat mengakses pelayanan dasar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan standar pelayanan minimal dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, infrastruktur dasar, dan sebagainya. Pasal 21 ayat (2) huruf a dalam peraturan ini menyebutkan bahwa setiap daerah wajib merumuskan rencana aksi penerapan SPM sebagai upaya konkret untuk mencapai standar pelayanan yang sesuai dan efektif.